



Alokasi Dana Kesehatan untuk Pencegahan Stunting Pada APB Nagari di Kecamatan Pancung Soal

Sentia Indah^{1✉}, Aldri Frinaldi², Asnil³, Nora Eka Putri⁴

Universitas Negeri Padang

Email: sentiaindah2000@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui terkait dengan alokasi dana kesehatan untuk pencegahan stunting pada APB Nagari di Kecamatan Pancung Soal. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Nagari Inderapura Barat dan Nagari kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Informan pada penelitian ini meliputi Wali Nagari Inderapura Barat, Wali Nagari kudo-Kudo Inderapura dan Bidan Desa Nagari Inderapura Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya beberapa nagari di Kecamatan pancung Soal dalam pengalokasian anggaran atau dana bidang kesehatan termasuk di dalamnya untuk upaya pencegahan stunting masih dinilai kurang karena rata-rata alokasinya di bawah 10% dari total APB Nagari. Sehingga, dalam pelaksanaan beberapa program upaya pencegahan stuntingpun menjadi belum optimal karena kurangnya anggaran tersebut.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Kesehatan, APB Nagari, Stunting*

Abstract

This research aims to see and find out the allocation of health funds for stunting prevention at APB Nagari in Pancung Soal District. This type of research is descriptive qualitative research. The research was carried out in Nagari Inderapura Barat and Nagari Kudo-Kudo Inderapura, Pancung Soal District, Pesisir Selatan Regency. Informants in this research included the Wali Nagari West Inderapura, the Wali Nagari Kudo-Kudo Inderapura and the Village Midwife of Nagari Inderapura West. The results of the research show that several nagari in Pancung District regarding budget allocation or funds for the health sector, including for efforts to prevent stunting, are still considered inadequate because the average allocation is below 10% of the total Nagari APB. Thus, the implementation of several stunting prevention programs has not been optimal due to the lack of budget.

Keywords: *Health Fund Allocation, APB Nagari, Stunting*

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk dapat mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini pemerintah pusat berharap dapat memberikan pelayanan publik yang semakin lebih dekat kepada masyarakat yang ada di daerah, sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah serta berkualitas terhadap berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan.

Adapun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini juga berlaku bagi pemerintahan tingkat desa atau nagari. Dimana pemerintahan desa juga diberikan oleh pemerintah pusat untuk dapat mengetahui kebutuhannya melalui dana yang diberikan setiap tahunnya untuk desa melalui dana transfer pusat pada APBD kabupaten/kota. Adapun kebijakan terkait pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zeho dkk, 2023). Dengan adanya kebijakan tentang desa tersebut, maka pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan sendiri terkait dengan APBDes yang ada. Adapun salah satu alokasi dana dari APB Desa yaitu alokasi dana kesehatan yang salah satunya termasuk alokasi anggaran untuk pencegahan stunting di tingkat desa.

Permasalahan stunting ini menjadi salah satu isu prioritas bidang kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Dimana, tingkat prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 27,3% pada tahun 2019 kemudian sebesar 24,4% pada tahun 2021 dan 21,6% di tahun 2022 (SSGI, 2022). Angka ini menunjukkan melebihi standar prevalensi tingkat

stunting yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 20%. Adapun target pemerintah pada tahun 2024 dapat diturunkan menjadi 14%.

Sehingga, alokasi dana desa untuk bidang kesehatan termasuk salah satunya stunting sangat penting. Hal ini dikarenakan dana desa berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran bidang kesehatan (Fadmawati, 2018). Maksudnya yaitu pemerintah desa diharapkan dapat menggunakan dana yang cukup untuk bidang kesehatan termasuk salah satunya untuk stunting sehingga dapat memberikan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat desa. Selain itu, terkait dengan alokasi dana desa untuk bidang kesehatan yang salah satunya berkaitan dengan upaya pencegahan stunting juga sudah termuat dalam kebijakan permendes PDTT RI No. 13 tahun 2020 yang didalamnya juga membahas terkait dengan advokasi konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa melalui aplikasi *electronic-Human Development Worker (e-HDW)* serta terkait pembentukan rumah desa sehat (Pua dkk, 2021).

Namun, alokasi dana desa bidang kesehatan termasuk pencegahan stunting ini dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pua dkk, 2021) yang menyatakan bahwasanya Desa Pimpi Kab. Boolang Mongondow Utara belum mengalokasikan dana untuk pembentukan rumah desa sehat (RDS), padahal pembentukan RDS ini termasuk salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa pada tahun 2021. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Setianingsih dkk, 2022) terkait Rembuk Stunting sebagai Upaya Percepatan Penurunan Kasus Stunting di Kecamatan Kemusu kabupaten Boyolali juga menemukan bahwasanya penanganan stunting di daerah tersebut kurang optimal dikarenakan masih kurangnya alokasi dana dan koordinasi antar OPD.

Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan persebaran data stunting wilayah kerja Puskesmas Inderapura Kecamatan Pancung Soal berada pada posisi ke-enam tertinggi dari dua puluh wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan dengan 3,5% untuk balita pendek dan 6,7% sangat pendek. Namun, alokasi dana desa atau nagari untuk bidang kesehatan termasuk pencegahan stunting masih dinilai kurang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wali Nagari Inderapura Barat yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan kegiatan lokakarya sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan stunting di tingkat nagari belum dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran dan lebih difokuskan pada pemberian BLT untuk masyarakat.

Padahal, alokasi anggaran bidang kesehatan terutama salah satunya untuk upaya pencegahan stunting ini sangat dibutuhkan karena menyangkut kualitas sdm pada masa

sekarang dan akan datang. Oleh karena itulah, peneliti ingin melihat dan mengetahui bagaimana terkait alokasi dana bidang kesehatan untuk stunting pada APB Nagari di Kecamatan Pancung Soal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Nagari Inderapura Barat dan Nagari kudo-Kudo Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Informan pada penelitian ini meliputi Wali Nagari Inderapura Barat, Wali Nagari kudo-Kudo Inderapura dan Bidan Desa Nagari Inderapura Barat. Teknik analisis data berdasarkan pada teori Miles dan huberman dalam (Sugiyono, 2012) berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan pada pemerintahan daerah untuk dapat mengurus pengelolaan keuangannya sendiri baik di tingkat provinsi, kab/kota serta tingkat desa. Adapun alokasi anggaran dana desa ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme transfer pusat ke daerah pada APBD kab/kota yang selanjutnya ditransfer ke masing-masing pemerintahan desa/nagari. Sehingga, pemerintahan desa/nagari dapat mengelola alokasi anggarannya sesuai kebutuhan daerah desa/nagari masing-masing. Adapun alokasi anggaran desa atau nagari ini salah satunya dialokasikan untuk bidang kesehatan termasuk upaya pencegahan stunting.

Di Kecamatan Pancung Soal, alokasi anggaran kesehatan termasuk pencegahan stunting oleh pemerintah nagari masih dinilai kurang. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran bidang kesehatan oleh beberapa nagari yang ada di Kecamatan Pancung Soal, dimana rata-rata pemerintahan nagari mengalokasikan APB Nagari untuk bidang kesehatan di bawah 5% dari total APB Nagari yang ada. Padahal berdasarkan peraturan BKKBN No. 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia sebesar 10% dari total APB Desa/Nagari (Fajar dkk, 2023). Terkait masih rendahnya alokasi anggaran bidang kesehatan termasuk pencegahan stunting di nagari yang ada di Kecamatan Pancung Soal dapat dilihat dari data beberapa APB Nagari berikut ini :

Tabel 1. Data Beberapa APB Nagari Di Kecamatan Pancung Soal Tahun 2024

NO.	NAGARI	ALOKASI ANGGARAN APB NAGARI BIDANG KESEHATAN
1.	NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA	96.146.000
2.	NAGARI TIGO SEPAKAT INDERAPURA	118.500.000
3.	NAGARI MUARA SAKAI INDERAPURA	68.788.500.00
4.	NAGARI INDERAPURA BARAT	95.079.000
5.	NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA	105.541.000
6.	NAGARI INDERAPURA	99.331.000

Sumber: Data APB Nagari tahun 2024 di Kecamatan Pancung Soal

Kemudian, terkait dengan masih kurangnya atau rendahnya alokasi anggaran kesehatan untuk pencegahan stunting pada APB Nagari di Kecamatan Pancung Soal juga disampaikan oleh Bidan Desa Nagari Inderapura Barat yang menyatakan bahwasanya alokasi anggaran untuk pencegahan stunting masih dirasa kurang seperti untuk pelaksanaan kegiatan posyandu yang tidak teratur dan kurangnya alat kesehatan di Poskesri Nagari Inderapura Barat. Hal ini ditegaskan oleh Bidan Desa Nagari Inderapura Barat bahwa "...SDMnya cukup, namun cuman kekurangan anggaran stunting. Karena hanya diberikan PMT selama tiga hari berturut-turut. Terus ini, kan poskesrinya sempit dan alat-alat juga kurang disini.

Selain itu, di Nagari Inderapura Barat juga ditemui bahwa kegiatan lokakarya sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan stunting belum dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wali Nagari Inderapura Barat yang menyatakan bahwa : "...lokakarya ini belum karena terkait anggaran juga, anggaran kita saat ini difokuskan kepada BLT."

Hal yang sama terkait masih kurangnya alokasi anggaran bidang kesehatan dalam pelaksanaan pencegahan stunting ini juga dialami oleh Nagari Kudo-Kudo Inderapura. Untuk pendirian RDS di Nagari Kudo-Kudo Inderapura belum dapat didirikan dikarenakan masih adanya keterbatasan anggaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Bapak Wali Nagari kudo-Kudo Inderapura yang menyatakan bahwa "...RDS belum, belum ada karena anggaran kurang".

Padahal RDS ini sangat penting karena juga bertujuan untuk dapat memperkuat urusan masyarakat terkait dalam upaya advokasi pemanfaatan dana dan aset desa pada APB Desa (Kemendes PDTT RI, 2018). Selain itu, (Istiqomah dkk, 2024) mengungkapkan terkait pentingnya pengalokasian anggaran kesehatan untuk stunting ini bagi masyarakat desa/nagari yaitu pada Desa Tlogoagung pengalokasian dana desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong upaya percepatan penurunan stunting. Dimana data yang

didapatkan selama penelitian telah menunjukkan hasil bahwa desa telah mampu menggunakan sebagian besar dana desa untuk pemberian kegiatan kesehatan, nutrisi serta stunting secara efektif. Sehingga ditemui perbedaan yang signifikan terkait dengan status gizi anak-anak di desa Tlogoagung tersebut. Kemudian, terdapat hubungan antara program pemberian PMT, tablet Fe, pengecekan kehamilan serta kepemilikan jaminan kesehatan pada ibu hamil dengan pencegahan stunting (Lela, 2022). Bahkan terdapat salah satu contoh desa/nagari yang menggunakan anggaran desa untuk alokasi kesehatan termasuk stunting sebesar 20,06% dari APBDes yang berhasil dalam penurunannya (Fajar dkk, 2023).

Selain itu dalam model implementasi kebijakan diantaranya seperti model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Edward III dan Van Meter yang menjelaskan terdapat salah satu variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi program/kegiatan dan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu berupa sumber daya (Indiahono, 2009). Adapun yang dimaksud sumber daya disini yaitu baik sumber daya manusia ataupun sumber daya keuangan. Dengan demikian, suatu organisasi apabila menginginkan pelaksanaan suatu program atau kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik atau berhasil salah satu variabel ataupun faktor yang dapat mendukung keberhasilan tersebut adalah sumber daya yang salah satunya adalah sumber daya keuangan atau anggaran. Sehingga, itulah mengapa alokasi APB Nagari untuk bidang kesehatan dalam hal pencegahan stunting sangat memerlukan alokasi anggaran yang cukup agar dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai upaya pencegahan stunting di Kecamatan Pancung Soal. Dengan berhasilnya pelaksanaan upaya pencegahan stunting di Kecamatan pancung Soal maka akan terjadi pula penurunan angka stunting sebagaimana tujuan utama dari pencegahan stunting itu sendiri sehingga sdm yang ada juga turut semakin lebih baik dan berkualitas.

SIMPULAN

Adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini pemerintah pusat berharap dapat memberikan pelayanan publik yang semakin lebih dekat kepada masyarakat yang ada di daerah, sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah serta berkualitas terhadap berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan. Adapun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini juga berlaku bagi pemerintahan tingkat desa atau nagari. Dengan adanya kebijakan tentang desa tersebut, maka pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan sendiri terkait dengan APBDes yang ada. Adapun salah satu alokasi dana dari APB Desa yaitu alokasi dana kesehatan yang salah satunya termasuk alokasi anggaran untuk pencegahan stunting di tingkat desa.

Permasalahan stunting merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah. Adapun di Kecamatan Pancung Soal juga melaksanakan berbagai upaya pencegahan stunting namun dalam pengalokasian anggaran di bidang kesehatan untuk pencegahan stunting masih dinilai kurang. Hal ini dapat dilihat dari APB Nari yang rata-rata alokasi anggaran bidang kesehatannya masih berada di bawah 10% dari total APB Nagari. Sehingga, pelaksanaan upaya pencegahan stunting menjadi tidak optimal hal ini pun juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa wali nagari beserta bidan desa. Bidan desa Nagari Inderapura Barat sebagai salah satu kader pencegahan stunting juga menyatakan masih kurangnya anggaran dan bahkan fasilitas dalam mendukung upaya pencegahan stunting. Sehingga, apabila keadaan seperti ini terus berlanjut maka tentu akan berdampak terhadap sulitnya menekan tingkat anak stunting kedepannya. Oleh karena itulah, mengapa alokasi dana untuk kesehatan sangat penting karena akan berdampak pada kualitas kesehatan atau kualitas dari sdm itu sendiri yang ada di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 2021. Status Gizi SSGI 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Belawati, R., Hastuti, S. K. W., Mulyani, S., & Widyaningsih, V. (2022). Rembug Stunting Sebagai Upaya Percepatan Penurunan Kasus Stunting di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. *Jurnal SOLMA*, 11(3), 694-703.
- Fajar, A. P. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Desa Lokus Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2022 (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Fadmawati, F. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri). Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. (Online), (NASKAH PUBLIKASI.pdf (ums.ac.id)).
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta:Gava Media.
- Istiqomah, D. W. N., Utami, T., & Sunesti, Y. (2024). Efektivitas Pengalokasian Dana Desa terhadap Program Percepatan Penurunan Stunting. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 607-623.
- Kemendes PDTT RI. 2018. Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa.

Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Lela, N., Haeruddin, H., & Amelia, A. R. (2023). Hubungan Penggunaan Dana Desa dengan Penurunan Kasus Stunting di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(4), 170-183.
- Pua, A., Maramis, F. R., & Tucunan, A. A. (2021). Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 10(8).
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zeho, F. H., Susiloningtyas, L., & Cahyono, A. D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 5(3), 619-626.